

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kebijakan luar negeri secara umum dapat diartikan sebagai sebuah tindakan atau strategi yang digunakan satu negara dalam berinteraksi dengan negara lain guna untuk mencapai kepentingannya. Menurut Webber dan Smith kebijakan luar negeri adalah sebuah kebijakan yang terdiri dari upaya mencapai tujuan, nilai, pengambilan keputusan, dan tindakan yang diambil oleh negara dimana pemerintah sebagian besar mengambil andil dalam bertindak dengan pihak luar atau lingkungan eksternal, selain itu turut mengontrol masyarakat dalam berinteraksi dengan lingkungan luar.¹ Sedangkan menurut Kegley dan Wittkopf kebijakan luar negeri ialah sebuah kebijakan pemerintah yang berwenang terhadap lingkungan internasional yang didasari adanya kepentingan dan tujuan nasional serta terdapat nilai-nilai dan instrumen dalam mengejar tujuan tersebut.²

Bagi Jepang kebijakan luar negerinya berfokus terhadap perwujudan perdamaian dunia, kebebasan demokrasi, resolusi konflik, kesejahteraan, dan konservasi lingkungan.³ Pemerintah Jepang mengutamakan diplomasi dalam menjalin dan menjaga hubungannya dengan negara lain. Selain itu, instrumen

¹ Mark Webber and Michael Smith, *Foreign Policy in Transformed World*, Prentice Hall, London, 2002, hal.11-12

² Kegley Charles W. Jr and Wittkopf Eugene R, *World Politics: Trend and Transformation*, 6th ed., New York: St.Martin's Press, 2001, hal.55

³ JIIA Forum/Symposium, *Speaker: Mr. Fumio Kishida, Minister for Foreign Affairs Theme: Japanese Foreign Policy in 2016*, The Japan Institute of International Affairs, http://www2.jiia.or.jp/en/forum_play.php?id=340&v=160119eng_Kishida_Minister_for_Foreign_Affairs.mp4, diakses pada 1 Februari 2016.

ekonomi turut menjadi landasan utama dalam kebijakan luar negeri Jepang. Penggunaan instrumen ekonomi ini didukung oleh kemajuan ekonomi yang dialami Jepang. Hal ini diperkuat dengan pernyataan menteri luar negeri Jepang yang menjelaskan terdapat dua poin utama dari kekuatan ekonomi Jepang yakni pertama, Jepang dapat memberikan kontribusi ekonomi kepada negara-negara berkembang dimana hal ini dapat digunakan Jepang dalam menjamin keamanan dan kemakmuran serta menciptakan perdamaian dan stabilitas dunia. Kedua, Jepang memiliki hubungan saling ketergantungan dengan negara-negara berkembang dimana Jepang memiliki keinginan untuk mengamankan kebutuhan sumber daya alam yang dibutuhkannya melalui kegiatan ekonomi.⁴

Dalam menjalin hubungan luar negerinya, bagi Jepang penting untuk meningkatkan hubungan bilateralnya dengan negara lain salah satunya ialah Tiongkok. Keinginan Jepang untuk meningkatkan hubungan bilateralnya melalui kerjasama dengan Tiongkok dibutuhkan dalam menciptakan perdamaian dan kesejahteraan bagi kedua negara. Jepang dan Tiongkok memiliki kepentingan yang sama, dimana bagi Jepang mitra dagang terbesarnya ialah Tiongkok. Sebaliknya begitu pula dengan Tiongkok, dimana bagi Tiongkok mitra dagang kedua terbesarnya ialah Jepang.⁵ Bagi Jepang kerjasama yang dilakukannya tidak hanya berfokus terhadap kerjasama dalam bidang ekonomi, perdagangan, komunikasi, dan transportasi, tetapi telah mengalami perluasan hingga kedalam

⁴ Ministry of Foreign Affairs, *The Current State of Economic Cooperation and it's outlook: The North-South Problem and Development Assistance*, Ministry of Foreign Affairs of Japan (MOFA), diakses dari www.mofa.go.jp pada 25 Mei 2015.

⁵ JIIA Forum/Symposium, *Speaker: Mr. Fumio Kishida, Minister for Foreign Affairs Theme: Japanese Foreign Policy in 2016*, The Japan Institute of International Affairs, http://www2.jiia.or.jp/en/forum_play.php?id=340&v=160119eng_Kishida_Minister_for_Foreign_Affairs.mp4, diakses pada 1 Februari 2016.

bentuk kerjasama di bidang energi dan lingkungan.⁶ Dalam kerjasama di bidang lingkungan, pada tahun 1989 Jepang dan Tiongkok menandatangani persetujuan pembentukan *Sino-Japanese Friendship Center for Environmental Protection*. Kemudian pada tahun 1994 melalui Perdana Menteri Hosokawa Jepang dan Tiongkok menandatangani perjanjian proteksi lingkungan.⁷

Isu lingkungan menjadi salah satu isu yang menarik bagi Jepang sehingga Jepang menjadikan isu lingkungan sebagai salah satu bidang kerjasamanya dengan negara lain. Ketertarikan Jepang terhadap isu lingkungan dapat dilihat dari keikutsertaan Jepang dalam *UN General Assembly Special Session on The Environment and Development* pada tahun 1997. Didalam pertemuan tersebut, melalui Perdana Menteri Hashimoto mengumumkan bahwa pemerintah Jepang memiliki rencana yang telah dibuat sesuai dengan isu lingkungan yakni *Initiatives for Sustainable Development Toward the 21st Century (ISD)*. Melalui ISD ini Jepang mengharapkan agar dapat terbentuknya kerjasama internasional di dalam isu lingkungan.⁸

Kerjasama terkait isu lingkungan ini juga dilakukan antara Jepang, Tiongkok dan Korea Selatan. Pada tahun 2013 ketiga negara tetangga tersebut menyelenggarakan pertemuan tahunan di Kitakyushu, Jepang yang membahas permasalahan polusi udara Tiongkok yang telah menyebar hingga ke Jepang dan

⁶ Ibid

⁷ Stephanie A. Weston, *Sino-Japanese Environmental Cooperation Towards a New Constructive Partnership*, Faculty of Law, Fukuoka University, 2010, pg.4-6

⁸ Ministry of Environment Japan, *ODA in Environment Conservation*, Government of Japan, <https://www.env.go.jp/earth/coop/document/08-ttmnce-82.pdf>, diakses pada 24 Maret 2015.

Korea Selatan.⁹ Semenjak tahun 1965 Tiongkok telah memulai kegiatan pembangunan ekonominya. Dalam melakukan kegiatan tersebut, Tiongkok membutuhkan penggunaan energi dari bahan bakar minyak dan batu bara secara besar-besaran. Penggunaan bahan bakar secara besar-besaran tersebut memunculkan permasalahan lain bagi Tiongkok dimana mengakibatkan terjadinya polusi udara. Selanjutnya polusi udara Tiongkok mulai meningkat pesat pada tahun 2000-an.¹⁰

Polusi udara terdiri dari beberapa partikel yang menyebabkan racun yakni partikel timah hitam dan gas buangan. Partikel yang banyak di temukan di Tiongkok merupakan PM 2.5 (*particulate matter up to 2.5 micrometers in size*), 60% PM 2.5 di Tiongkok dihasilkan dari kegiatan pembakaran bahan bakar minyak dan batu bara. PM 2.5 dapat mengganggu kesehatan ketika mencapai level tinggi di udara. Ukuran PM 2.5 yang kecil ini dapat masuk melalui saluran pernafasan hingga ke paru-paru. Paparan dari partikel ini juga dapat mengakibatkan gangguan kesehatan jangka pendek seperti iritasi pada mata, hidung, dan tenggorokan.¹¹

Pada tahun 2013 terjadi peningkatan aktivitas pembakaran bahan bakar batu bara di Tiongkok sebanyak 3.6 milyar ton yang tersebar di Beijing, Harbin,

⁹ Keisuke Katori, *Diplomatic Differences Aside: Japan, S.Korea, China Agree to Fight Pollution*, The Asahi Shimbun, Japan, 2013, http://ajw.asahi.com/article/behind_news/politics/AJ201404300028, diakses pada 15 Agustus 2015.

¹⁰ Simon Saragih, *Pertumbuhan Ekonomi China Bukan Tanpa Masalah dalam Cermin dari China: Geliat Sang Naga di Era Globalisasi*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2006. hal. 133.

¹¹ Department of Health, *what is PM 2.5?*, Information for Healthy New York, New York State, 2012, health.ny.gov/environmental/indoors/air/pmq_a.html, diakses pada 15 Oktober 2015.

Linfen dan Tianjin .¹² Total pembakaran bahan bakar batu bara di Tiongkok jika dibandingkan dengan negara-negara lainnya (seperti Amerika Serikat, Jepang dan Korea Selatan,) Tiongkok masih menjadi negara yang paling banyak melakukan pembakaran bahan bakar batu bara sebesar 30 ton. Peningkatan polusi udara di Tiongkok yang terjadi pada tahun 2013 tidak hanya didukung oleh faktor peningkatan aktivitas pembakaran bahan bakar batu bara itu sendiri, akan tetapi di tahun 2013 Tiongkok melakukan pembakaran bahan bakar batu bara muda yang mana menghasilkan polusi lebih banyak dibandingkan dengan jenis batu bara biasa.¹³

Beberapa permasalahan yang ditimbulkan oleh polusi udara Tiongkok diantaranya banyak ditemukan terjadinya penundaan jadwal penerbangan dikarenakan kabut asap yang menutupi jarak pandang di Beijing.¹⁴ Kemudian munculnya persoalan gangguan kesehatan yang diakibatkan ketika menghirup udara yang telah bercampur dengan berbagai macam partikel polusi seperti, gangguan pernafasan, tumor, dan kanker paru-paru. Mantan menteri kesehatan Tiongkok, Chen Zu menyatakan setidaknya terdapat 500 ribu kasus bayi yang meninggal prematur disebabkan oleh polusi udara di Tiongkok.¹⁵

Pemerintah Tiongkok telah mencoba berbagai macam upaya agar dapat mengatasi permasalahan polusi udara ini. Upaya pertama yang dilakukan

¹² China Real Time, *Pollution Documentary under the Dome Blankets Chinese Internet*, The Wall Street Journal, 2013, <http://blogs.wsj.com/chinarealtime/2015/03/02/pollution-documentary-under-the-dome-blankets-chinese-internet/>, diakses pada 9 Maret 2015.

¹³ Ibid

¹⁴ Chai Jing, *Under the Dome: Investigating China's Smog*, Documentary Video, Published on March 2015, <https://www.youtube.com/watch?v=T6X2uwlQGQM&t=390>, diakses pada 9 Maret 2015.

¹⁵ Ibid

Tiongkok ialah Tiongkok mengambil tindakan dengan mengikuti program *Clean Development Mechanism (CDM)*. Program ini merupakan salah satu program yang dirancang dibawah Kyoto Protokol. Setelah Tiongkok mendapatkan sertifikat CDM, maka Tiongkok dapat melakukan kerjasama dengan negara-negara yang turut meratifikasi Kyoto Protokol dan melakukan kerjasama melalui investasi dengan memberikan tambahan dana, transfer teknologi, dan sebagainya. Akan tetapi upaya ini tidak begitu efektif dalam mengatasi permasalahan ini dimana teknologi yang dibutuhkan dalam program CDM ini merupakan teknologi canggih yang membutuhkan dana lebih banyak.¹⁶

Upaya lainnya yang telah dilakukan Tiongkok adalah Tiongkok menerapkan kebijakan *Upgraded Brown Coal* dimana batu bara diproses kembali melalui cara mekanik atau perlakuan panas. Cara ini akan dapat mengurangi kadar air dalam batu bara sehingga polusi yang dihasilkan akan lebih sedikit jika dibandingkan menggunakan batu bara biasa. Upaya selanjutnya ialah penutupan pabrik-pabrik yang tidak melakukan *upgraded brown coal*, dimana terdapat 2.087 pabrik yang akhirnya ditutup. Akan tetapi upaya ini pun tidak berhasil dalam mengatasi permasalahan polusi udara di Tiongkok, sebaliknya hal ini berdampak terhadap pengurangan pendapatan Beijing dan diiringi dengan meningkatnya jumlah pengangguran.¹⁷

Polusi udara Tiongkok telah menjadi isu lintas batas negara, dimana polusi udara tersebut telah menyebar hingga ke Jepang. Penyebaran polusi udara

¹⁶ Lely Fadillah, *Upaya Pemerintah Cina Dalam Pengurangan Emisi Gas Buang di Beijing Melalui Clean Development Mechanism Tahun 2005-2008*, Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Mulawarman, 2014, 2 (3): 657-672.

¹⁷ Ibid

Tiongkok hingga ke Jepang turut memberikan dampak buruk bagi Jepang. Hal ini dikarenakan polusi udara Tiongkok secara mayoritas terjadi ditimbulkan dari kegiatan industri yang banyak mengandung zat-zat berbahaya. Penyebaran polusi udara Tiongkok ke Jepang ditemukan berupa PM 2.5, hujan asam dan debu kuning.¹⁸

Hujan asam ialah hujan yang memiliki angka pH dibawah 5,6 terjadi ketika emisi sulfur dioksida dan nitrogen dioksida bereaksi di atmosfer dengan air, oksigen, dan berbagai bahan kimia lainnya.¹⁹ Dalam studi-studi ilmiah hujan asam terbukti dapat merusak lingkungan seperti tanaman, air, tanah, bahkan dapat mengikis bahan-bahan bangunan karena bersifat korosif. Sementara itu debu kuning (*yellow dust*) merupakan sebuah fenomena polusi yang terjadi di Tiongkok, dimana debu yang dibawa oleh pusan angin di Gurun Gobin yang turut membawa banyak polutan beracun kimia dari pabrik Tiongkok menyebar hingga ke Jepang. Debu kuning dapat menyebabkan jarak pandang terbatas serta mengakibatkan gangguan kesehatan seperti asma yang dapat terjadi terhadap orang yang sehat sekalipun.

Penyebaran polusi udara Tiongkok telah menyebar ke beberapa daerah di Jepang seperti Tokyo, Fukuoka, Kyushu, dan sekitarnya. Masyarakat Jepang yang merasakan dampak dari penyebaran polusi udara Tiongkok melakukan protes dengan melaporkan keluhan mereka kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan meminta pemerintah Jepang untuk mengambil tindakan terhadap permasalahan ini.

¹⁸ Kanoko Matsuyama, *Tokyo Air Pollution Climbs, Approaches Government Alert Levels*, Bloomberg, 2014, <http://www.bloomberg.com/news/articles/2014-02-27/tokyo-air-pollutionclimbs-approaches-government-alert-levels>, diakses pada 20 Februari 2016.

¹⁹ Peter Navarro, *The Coming China Wars; Letupan-Letupan Perang China Masa Mendatang*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2007, hal.55

Hal ini turut diklarifikasikan kebenarannya oleh Yasushi Nakajima yang merupakan staf ahli dari Kementerian Lingkungan Hidup. Selain itu, Atsushi Shimizu dari *National Institute for Environmental Studies* (NIES) mengungkapkan bahwa udara dan angin dari barat yang datang ke Jepang telah membawa debu partikel PM 2.5 dengan berat 50 mikrogram perkubik yang mana batas normal maksimal dari partikel ini ialah hanya 35 mikrogram.²⁰

Dampak buruk yang dirasakan Jepang dari penyebaran polusi udara ini berdampak terhadap aspek kesehatan, lingkungan hidup, ekonomi, sosial dan politik. Dari aspek kesehatan, terbukti telah banyak ditemukannya keluhan masyarakat yang mengalami berbagai macam gangguan kesehatan seperti gangguan pernafasan, asma, paru-paru, kanker, dan sebagainya. Dari aspek lingkungan hidup banyak ditemukannya tanaman dan hasil pertanian yang mengalami kerusakan akibat dari pencemaran polusi udara, hujan asam, dan debu kuning yang membawa zat-zat kimia berbahaya. Dari peristiwa ini maka munculah kekhawatiran yang akan mengakibatkan krisis pangan dimana mulai terjadi penurunan produktifitas pangan.²¹

Pada aspek sosial dan politik mendorong munculnya berbagai protes dari berbagai macam gerakan sosial masyarakat, sementara itu dengan adanya permasalahan polusi udara ini akan dapat memungkinkan terjadinya konflik baru antara Jepang dan Tiongkok jika tidak ditanggapi dengan baik melalui kerjasama

²⁰ Richard Susilo, *Polusi Udara Beracun Dari Cina Mulai Masuk ke Jepang*, Tribun International, Tokyo, Jepang, 5 Februari 2013, <http://www.tribunnews.com/internasional/2013/02/05/mengerikan-polusi-udara-beracun-dari-china-mulai-masuk-ke-jepang>, diakses pada 7 Februari 2016.

²¹Doddy Wihardi dan Alexander Peter Sandi Manusiwa, *Kontribusi Faksi Reformasi dalam Pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan di Cina Masa Jiang Zemin*, Universitas Budi Luhur, 2007 hal. 29

antar kedua-negara. Dari aspek ekonomi Jepang mengalami kerugian yang mencapai miliaran dolar dimana dari polusi udara yang terjadi menghambat aktivitas ekonomi masyarakat dan mengakibatkan kerusakan terhadap bangunan-bangunan yang turut menjadi kerugian secara ekonomi bagi Jepang.²²

Melihat kerugian yang dialami oleh Jepang, Menteri Lingkungan Hidup Jepang Ichiro Kamoshita meminta pemerintah Tiongkok untuk mengungkapkan data dan informasi polusi udara secara transparan. Adanya respon yang diberikan pemerintah dan masyarakat Jepang terhadap permasalahan penyebaran polusi udara Tiongkok ini maka permasalahan polusi udara Tiongkok memang menjadi permasalahan yang krusial bagi Jepang. Selain itu, krusialnya permasalahan ini bagi Jepang turut dipertegas oleh pernyataan Perdana Menteri Shinzo Abe yang menyatakan bahwa polusi udara Tiongkok yang menyebar ke Jepang menjadi ancaman dan ketakutan bagi Jepang. Selanjutnya, kepala kabinet sekretaris Yoshihide Suga meneruskan pernyataan pemerintah Jepang yang menyatakan bahwa pemerintah Jepang akan mengambil tindakan dalam mengatasi permasalahan ini.²³

Bagi pemerintah Jepang, polusi udara merupakan sebuah fenomena ketika zat-zat buangan kimia dan biologi dipancarkan ke seluruh permukaan atmosfer kemudian mengalami difusi dan deposisi (pengendapan) serta memiliki volume lebih banyak melebihi dari kondisi batas normal. Selanjutnya, ketika fenomena ini

²² Peter Navarro, *The Coming China Wars; Letupan-Letupan Perang China Masa Mendatang*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2007, hal.55-56

²³ Kyodo, *Tokyo Beijing to Cooperate Over China Air Pollution Menace*, The Japanese Times News, 23 Februari 2013, <http://www.japantimes.co.jp/news/2013/02/23/national/tokyo-beijing-to-cooperate-over-china-air-pollution-menace/#.VuBvEYx9600>, diakses pada 9 Maret 2016.

terjadi maka akan dapat memberikan pengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap makhluk hidup termasuk manusia.²⁴

Melihat permasalahan polusi udara Tiongkok yang menjadi salah satu permasalahan serius bagi Jepang, maka pemerintah Jepang mengambil sebuah kebijakan luar negeri yakni berupa pendistribusian bantuan luar negeri atau lebih dikenal sebagai ODA (official development assistance) melalui bentuk kerjasama teknik. Dari bentuk kebijakan yang telah diambil oleh Jepang, maka bagi penulis penting untuk melihat bagaimana proses pembuatan kebijakan luar negeri Jepang terhadap permasalahan polusi udara Tiongkok yang pada akhirnya Jepang memutuskan menggunakan kebijakan ODA tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

Penyebaran polusi udara Tiongkok hingga ke Jepang yang berupa kabut asap, debu kuning, dan hujan asam memberikan dampak buruk bagi Jepang terhadap berbagai macam aspek. Pada aspek kesehatan, banyak masyarakat Jepang yang mulai mengalami gangguan kesehatan dari gangguan pernapasan hingga kanker, pada aspek lingkungan hidup banyak ditemukannya kerusakan terhadap tanaman dan hasil pertanian, pada aspek sosial dan politik berdampak terhadap protes dari berbagai macam gerakan sosial masyarakat serta memungkinkan munculnya konflik baru bagi kedua negara jika tidak ditanggapi dengan baik melalui kerjasama, selanjutnya pada aspek ekonomi Jepang turut mengalami kerugian yang mencapai miliaran dolar akibat dari kerusakan yang ditimbulkan oleh polusi udara tersebut. Melihat seriusnya dampak buruk yang

²⁴ Ministry of The Environment, *Air Pollution Control Technology Manual: An Introduction to Air Pollution*, Environmental Cooperation Office, Global Environment Bureau, Ministry of The Environment Government of Japan, 2005, pg.5

dialami oleh Jepang dari penyebaran polusi udara Tiongkok, maka pemerintah Jepang mengambil sebuah kebijakan yakni pendistribusian bantuan luar negeri ODA (official development assistance) melalui kerjasama teknik. Setelah adanya penetapan kebijakan ODA ini maka dalam penelitian ini melihat bagaimana proses pembuatan kebijakan luar negeri Jepang terhadap polusi udara Tiongkok yang pada akhirnya memutuskan menetapkan kebijakan tersebut.

1.3 Pertanyaan Penelitian

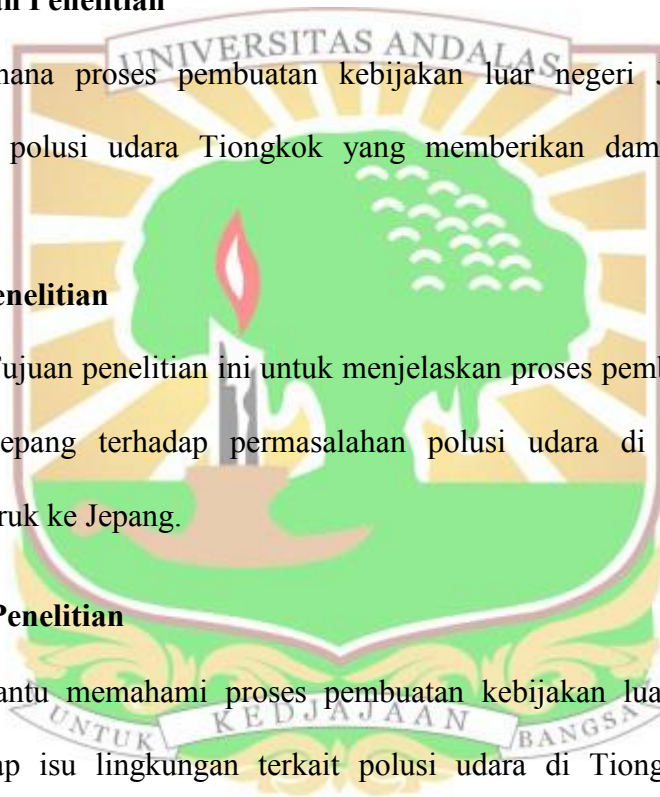
Bagaimana proses pembuatan kebijakan luar negeri Jepang terhadap permasalahan polusi udara Tiongkok yang memberikan dampak buruk bagi Jepang?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan proses pembuatan kebijakan luar negeri Jepang terhadap permasalahan polusi udara di Tiongkok yang berdampak buruk ke Jepang.

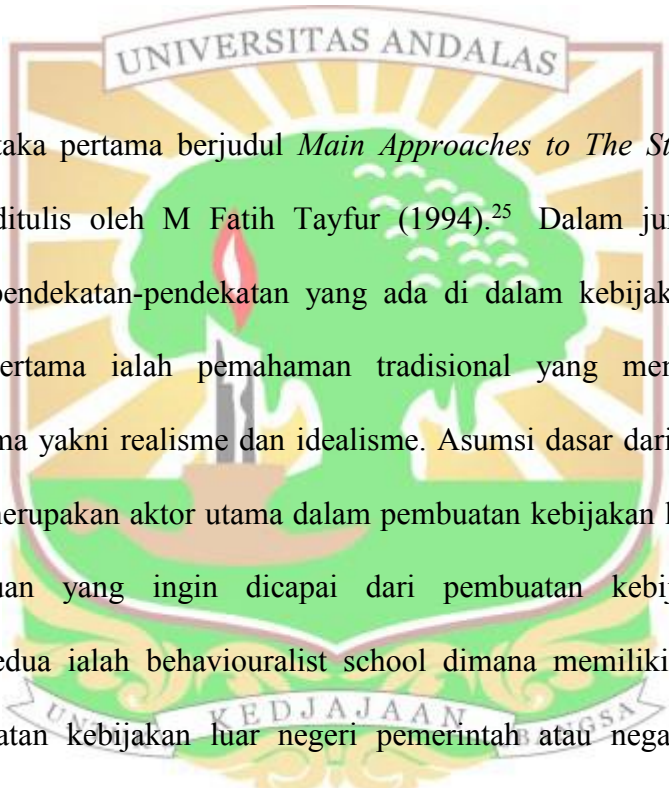
1.5 Manfaat Penelitian

- Membantu memahami proses pembuatan kebijakan luar negeri Jepang terhadap isu lingkungan terkait polusi udara di Tiongkok yang telah menyebar dan berdampak buruk bagi Jepang.
- Menambah referensi dan kepustakaan dalam Ilmu Hubungan Internasional dalam kajian kebijakan luar negeri khususnya pada isu lingkungan yakni polusi udara.



1.6 Studi Pustaka

Dalam menunjang penelitian ini, penulis menggunakan penelitian-penelitian terdahulu yang terkait dengan topik dan tema serupa dengan judul penelitian yang diangkat penulis. Penelitian-penelitian terdahulu tersebut menjadi studi pustaka penulis dan berfungsi sebagai acuan untuk melakukan analisa lebih mendalam terhadap komponen-komponen yang hendak diteliti. Oleh karena itu, penulis mengambil lima studi pustaka yang telah disimpulkan sebagai berikut :



Studi pustaka pertama berjudul *Main Approaches to The Study of Foreign Policy* yang ditulis oleh M Fatih Tayfur (1994).²⁵ Dalam jurnal ini Tayfur menjelaskan pendekatan-pendekatan yang ada di dalam kebijakan luar negeri. Pendekatan pertama ialah pemahaman tradisional yang menggunakan dua perspektif utama yakni realisme dan idealisme. Asumsi dasar dari pendekatan ini ialah negara merupakan aktor utama dalam pembuatan kebijakan luar negeri serta memiliki tujuan yang ingin dicapai dari pembuatan kebijakan tersebut. Pendekatan kedua ialah behaviouralist school dimana memiliki asumsi bahwa dalam pembuatan kebijakan luar negeri pemerintah atau negara tidak hanya bertugas dalam memutuskan sebuah kebijakan tetapi turut bertugas dalam mengobservasi dan menganalisa implementasi kebijakan tersebut. Sementara itu pendekatan ketiga ialah comparative foreign policy dimana dalam pendekatan ini mengkategorikan lima variabel utama yang menjadi pedoman dalam perilaku kebijakan luar negeri yakni idiosinkrasi, peranan, pemerintahan, sosial dan

²⁵ M Fatih Tayfur, *Main Approaches to The Study of Foreign Policy*, METU Studies in Development, Department of International Relations, Middle East Technical University, Ankara, Turkey, 21 (1), 1994.

sistemik. Sementara itu dalam pendekatan ini juga terdapat variabel yang digunakan untuk melakukan perbandingan kebijakan melalui variabel tipologi seperti ukuran pembangunan dan akuntabilitas politik.

Studi pustaka kedua adalah penelitian yang ditulis oleh Hitoshi Tanaka dan Adam P. Liff (2009) yang berjudul *Japan's Foreign Policy and East Asian Regionalism*.²⁶ Dalam penelitian ini menjelaskan bagaimana fokus kebijakan luar negeri Jepang serta regionalisme di Asia Timur. Paska Perang Dunia II kebijakan luar negeri Jepang berfokus kepada aktivitas ekonomi guna membangun kekuatan ekonominya. Sehingga isu-isu ekonomi menjadi isu utama dalam kebijakan luar negeri Jepang pada saat itu. Selanjutnya pada tahun 1956 fokus kebijakan luar negeri Jepang mulai disesuaikan dengan prinsip utama UN (United Nations) dimana pada saat itu Jepang mulai bergabung kedalam UN. Sehingga kebijakan luar negeri Jepang berfokus kepada diplomasi sesuai dengan UN, kerjasama dalam dunia bebas, serta pelestarian identitas Jepang sebagai negara Asia. Pada tahun 1990-an kebijakan luar negeri Jepang tidak hanya berfokus kepada isu-isu ekonomi tetapi telah meluas hingga ke bentuk promosi kerjasama isu-isu lingkungan dan non-poliferasi nuklir. Hingga pada saat ini fokus kebijakan luar negeri Jepang tidak banyak mengalami perubahan dimana masih berfokus kepada kerjasama perdagangan, perwujudan perdamaian dunia, resolusi konflik serta konservasi lingkungan.

Di dalam kawasan Asia Timur pembentukan sebuah komunitas menjadi hal yang sulit untuk diwujudkan. Hal ini disebabkan oleh kawasan Asia Timur dikenal sebagai kawasan yang sangat rentan terhadap konflik. Secara politik

²⁶ Hitoshi Tanaka and Adam P. Liff, *Japan's Foreign Policy and East Asian Regionalism*, International Institutions and Global Governance Program Japan Studies Program, Princeton University, 2009.

hubungan antar negara tetangga sering mengalami ketegangan dan ketidakpercayaan. Selain itu juga terdapat permasalahan terhadap adanya kesenjangan ekonomi di dalam kawasan tersebut.

Studi pustaka selanjutnya ialah penelitian yang ditulis oleh Shunji Matsuoka (2014) berjudul *Japan's Asian Strategy: Japan's Asian Environmental Strategy and A Soft Power of The 21st Century*.²⁷ Pada penelitian ini meneliti strategi Jepang dalam membentuk institusi lingkungan Asia. Strategi pertama yang dilakukan oleh Jepang ialah dengan memberikan dukungan untuk negara berkembang melalui kerjasama bilateral dan meningkatkan ODA untuk isu lingkungan. Strategi kedua ialah memperluas kerjasama lingkungan dari kerjasama bilateral menjadi kerjasama multilateral yang menuju kepada pembentukan institusi lingkungan regional. Awal mula dari strategi ini dilakukan oleh Jepang ketika permasalahan lingkungan global menjadi isu yang menarik perhatian dunia karena adanya *Earth Summit 1992*. Hasilnya, pada saat itu Korea Selatan dan ASEAN turut mulai melakukan upaya pembangunan institusi regional dalam kerjasama lingkungan. Selanjutnya pada abad 21, Tiongkok yang telah maju secara ekonomi dan politik turut mengalami permasalahan lingkungan dalam negerinya. Oleh karena itu negara-negara utama yang berpartisipasi dalam strategi lingkungan Asia pada pertengahan awal abad 21 ialah Jepang, South Korea, Tiongkok, dan ASEAN.

²⁷ Shunji Matsuoka, *Japan's Asian Strategy: Japan's Asian Environmental Strategy and A Soft Power of The 21st Century*, Policy Research Institute, Ministry of Finance, Japan, Public Policy Review, Vol.10, No.1, March 2014.

Studi pustaka keempat berjudul *Sino-Japanese Environmental Cooperation Towards a New Constructive Partnership* karya Stephanie A. Weston (2010).²⁸ Dalam jurnal ini memberikan analisis bagaimana isu-isu keamanan non tradisional dapat membentuk hubungan baru antara dua negara yang paling maju dalam sektor ekonomi di Asia. Menurut menteri lingkungan pemerintahan Jepang ketika Jepang memaksimalkan kerjasama ekonomi dengan Tiongkok, Jepang turut memperhatikan persoalan lingkungan, pembangunan berkelanjutan, dan penciptaan ekonomi global yang stabil. Oleh karena itu, bagi Jepang kerjasama ini tidak hanya untuk kepentingan domestik semata tetapi juga untuk peningkatan hubungan bilateral dengan Tiongkok dan dalam cakupan lebih besar juga sebagai kontribusi global.

Salah satu bentuk-bentuk kerjasama dalam isu lingkungan yang dilakukan oleh Jepang dan Tiongkok ialah *Sino-Japanese Friendship Center for Environmental Protection* pada tahun 1989 serta *Japan-China Greening Exchange Fund* pada tahun 1999. Kerjasama lingkungan yang dilakukan Jepang dan Tiongkok menjadikan hubungan bilateral kedua negara semakin membaik, hal ini menjadikan isu lingkungan memiliki peran positif dalam menjalin hubungan kerjasama kedua negara.

²⁸ Stephanie A. Weston, *Sino-Japanese Environmental Cooperation Towards a New Constructive Partnership*, Faculty of Law, Fukuoka University, 2010.

Studi pustaka terakhir berjudul *Mutual Interests and Policy Networks: Sino-Japanese Cooperation in The Environment and Energy* karya dari Hidetaka Yoshinatsu (2010).²⁹ Jurnal ini membahas kerjasama Tiongkok dan Jepang dalam lingkungan dan energi dengan memperhatikan kepentingan bersama. Pada tahun 2000 kerjasama Tiongkok dan Jepang direvitalisasi, hal ini dikarenakan adanya kesamaan kepentingan dalam mengenalkan pengalaman teknologi yang maju dan mengekspansi bisnis yang berhubungan dengan energi bagi Jepang. Sementara itu bagi Tiongkok kemerosotan kondisi lingkungan dan meningkatnya kebutuhan energi Tiongkok mengakibatkan terjadinya peningkatan kepentingan dalam kemajuan kerjasama substansial energi dan lingkungan.

1.7 Kerangka Konseptual

1.7.1 Teori Kebijakan Luar Negeri

Penelitian yang diteliti oleh penulis berangkat dari sebuah permasalahan polusi udara Tiongkok yang kemudian menyebar ke Jepang dan memberikan dampak buruk bagi Jepang. Dalam membantu menjawab pertanyaan penelitian, penulis menggunakan teori kebijakan luar negeri. Melalui teori kebijakan luar negeri ini akan dapat dilihat bagaimana tindakan Jepang dalam menghadapi permasalahan polusi udara yang disebabkan oleh Tiongkok.

Secara umum politik luar negeri ialah sebuah pedoman bagi suatu negara dalam bertindak terhadap lingkungan eksternalnya. Tidak hanya itu, politik luar negeri (*foreign policy*) juga diartikan sebagai suatu komitmen dasar berupa sebuah

²⁹ Hidetaka Yoshinatsu, *Mutual Interests and Policy Networks: Sino-Japanese Cooperation in The Environment and Energy*, Ritsumeikan Center for Asia Pacific Studies (RCAPS) No.09-10, 2010.

strategi dalam mencapai tujuan atau kepentingan baik dalam konteks luar negeri dan dalam negeri yang turut menentukan keterlibatan suatu negara di dalam isu-isu internasional. Seterusnya, arti lain kebijakan luar negeri turut dimaknai sebagai sebuah strategi ataupun tindakan yang diambil oleh suatu negara dalam berinteraksi dengan negara lain guna untuk mencapai kepentingannya.

Menurut Tayfur kebijakan luar negeri merupakan sebuah bentuk kegiatan resmi yang dirumuskan dan diimplementasikan oleh agen-agen resmi dari negara berdaulat sebagai sebuah orientasi, rencana, komitmen, dan tindakan yang ditujukan kepada lingkungan eksternal negara.³⁰ Selanjutnya menurut Kegley dan Wittkopf kebijakan luar negeri merupakan sebuah kebijakan pemerintah yang berwenang terhadap lingkungan internasional yang didasari adanya kepentingan dan tujuan nasional serta sekaligus terdapat nilai dan instrumen dalam mengejar tujuan tersebut.³¹ Sedangkan menurut Webber dan Smith kebijakan luar negeri ialah suatu kebijakan yang terdiri dari upaya mencapai tujuan, nilai, pengambilan keputusan, dan tindakan yang diambil oleh negara dimana pemerintah sebagian besar mengambil andil dalam bertindak dengan pihak luar atau lingkungan eksternal, selain itu turut mengontrol masyarakat dalam berinteraksi dengan lingkungan luar.³²

Agar dapat lebih memahami teori kebijakan luar negeri atau politik luar negeri ini, Yanyan Mochmad Yani memisahkan arti dari politik dan luar negeri.

³⁰ Fatih Tayfur, *Main Approaches to The Study of Foreign Policy: A Review*, Department of International Relations, Middle East Technical University, Turkey, 1994, hal.113-141

³¹ Kegley Charles W. Jr, Wittkopf Eugene R, *World Politics:Trend and Transformation*, 6th ed., New York: St.Martin's Press, 2001, hal.55

³² Mark Webber, Michael Smith, *Foreign Policy in Transformed World*, Prentice Hall, London, 2002, hal.11-12

Politik (*policy*) ialah seperangkat keputusan yang menjadi pedoman untuk bertindak atau seperangkat aksi yang bertujuan untuk mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. *Policy* berakar dari konsep *choices* yang berarti pilihan dimana bermakna dapat memilih tindakan atau membuat keputusan untuk mencapai suatu tujuan.³³ Sementara itu luar negeri (*foreign*) berkaitan dengan konsep wilayah atau kedaulatan yang berarti kontrol terhadap wilayah yang dimiliki oleh suatu negara.³⁴ Jadi politik luar negeri (*foreign policy*) berarti seperangkat pedoman dalam memilih tindakan yang ditujukan ke luar wilayah suatu negara.

Dari beberapa penjabaran definisi kebijakan luar negeri menurut para ahli, penulis menyimpulkan bahwa kebijakan luar negeri merupakan instrumen yang digunakan suatu negara dalam mencapai kepentingan nasionalnya terhadap negara lain.

Dalam analisis kebijakan luar negeri terdapat tiga model pembuatan kebijakan luar negeri, salah satunya ialah model *rational choice*. Model pembuatan kebijakan luar negeri ini menggunakan *unitary actors* sebagai *decision makers*. Selain itu dalam model *rational choice* ini, *national interest* digunakan sebagai penjelasan rasional dalam proses pembuatan kebijakan luar negeri tersebut.³⁵

³³ Yanyan Mochmad Yani, Politik Luar Negeri, (Paper yang disampaikan dalam kegiatan Seminar Sistem Politik Luar Negeri bagi Perwira Siswa Sekolah Staf dan Komando Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara atau Sesko TNI AU, Angkatan ke-44 TP 2007), Bandung, 16 Mei 2007, hal. 1

³⁴ Ibid, hal. 2

³⁵ Kegley Charles W. Jr, Wittkopf Eugene R, World Politics:Trend and Transformation, 6th ed., New York: St.Martin's Press, 2001.

Menurut Allison dan Zelikow *rational choice* ialah tindakan analisis yang dilakukan oleh negara dengan asumsi bahwa negara mempertimbangkan semua pilihan dan kemungkinan untuk kemudian bertindak secara rasional untuk memaksimalkan utilitas (pemanfaatan kapasitas yang ada) dan keuntungan yang diperoleh.³⁶ Menurut Kegley proses pembuatan kebijakan *rational choice* merupakan prosedur pengambilan keputusan yang dipandu oleh pendefinisian hati-hati dari sebuah situasi, menimbang tujuan, mempertimbangkan semua alternatif dan pemilihan opsi paling menguntungkan serta memungkinkan untuk mencapai tujuan tertinggi.³⁷

Terdapat beberapa variabel-variabel penting dalam model *rational choice* yakni:³⁸

- Pemerintah negara diperlakukan sebagai aktor utama
- Informasi yang dimiliki oleh pemerintah adalah lengkap
- Pemerintah memproses informasi sesuai dengan aturan mengoptimalkan tindakan rasional
- Pemerintah mengkaji semua tujuan dan kepentingan, mengevaluasi sesuai dengan utilitas mereka, kemudian mengambil salah satu keputusan dimana mempertimbangkan *cost&benefit* terhadap *national interest* negaranya

³⁶ Graham Allison, Philip Zelikow, *Essence of Decision Making: Explaining the Cuban Missile Crisis*, 2nd Edition, Longman Inc., 1999.

³⁷ Charles W. Kegley Jr., *World Politics, Trend, and Transformation*, University of Memphis, USA, 2011, Pg.196.

³⁸ Ibid

Kegley dan Wittkopf menjelaskan bahwa dalam pembuatan kebijakan luar negeri yang menggunakan model *rational choice* terdapat empat langkah yang harus diikuti oleh para pembuat kebijakan, yakni :³⁹

1. *Problem Recognition and Definition*

Pada langkah pertama ini *decision makers* harus mengetahui masalah eksternal yang ada dan kemudian mencoba secara objektif untuk membedakan karakteristiknya. Objektif yang dimaksud ialah mengumpulkan informasi secara menyeluruh tentang isu, aksi, pergerakan, dan kapabilitas aktor lain sehingga informasi yang dikumpulkan secara menyeluruh sesuai dengan fakta permasalahan tersebut.

2. *Goal Selection*

Decision makers harus mengetahui dan mendefinisikan tujuan apa yang ingin dicapai. Pada langkah ini juga dibutuhkan identifikasi serta peringkat semua nilai-nilai terhadap hal-hal yang diutamakan seperti untuk keamanan atau kesejahteraan ekonomi. Kepentingan nasional biasanya merupakan tujuan atau prioritas utama.

3. *Identification of Alternatives*

Setelah pendefinisian atau pengidentifikasian isu serta penentuan tujuan maka rasionalitas dibutuhkan dalam penyusunan data-data secara menyeluruh terhadap daftar lengkap dalam menentukan alternatif-alternatif atau opsi-opsi kebijakan yang akan dibuat.

³⁹ Ibid

4. Choice

Rasionalitas dibutuhkan dalam memilih satu pilihan tunggal yang memiliki kemungkinan terbesar dalam keberhasilan pencapaian tujuan yang diinginkan. Pemilihan satu kebijakan ditetapkan ketika *decision makers* telah memiliki prediksi yang akurat atas keberhasilan alternatif yang dipilih.

1.8 Metodologi Penelitian

Dalam mendapatkan pengetahuan sosial yang baik terkait isu tertentu kita dapat melakukan sebuah penelitian. Penelitian masih memiliki beberapa pengertian yang berbeda, akan tetapi beberapa para ahli menyepakati definisi penelitian sebagai satu proses penyelidikan, sistematis, dan metodis, serta penelitian sebagai solusi atas suatu masalah dan meningkatkan pengetahuan.⁴⁰ Sebagai seorang peneliti sosial yang meneliti mengenai isu-isu sosial serta mencari solusi dari permasalahan isu sosial tersebut, maka penelitian sosial diartikan sebagai penyelidikan tentang satu gejala sosial maupun hubungan antara dua atau lebih gejala sosial melalui aplikasi sistematis dari metodologi ilmiah.⁴¹ Oleh karena itu, penelitian sosial dapat membantu memberikan jawaban dari pertanyaan tentang berbagai fenomena sosial sehingga masyarakat akan dapat memahami fenomena sosial tersebut.⁴²

Dalam penelitian sosial terdapat perbedaan utama yang dapat membedakan antara satu penelitian sosial dengan penelitian sosial lainnya, yakni hakikat dari gejala yang dipelajari. Misalnya, jika penelitian sosial mempelajari

⁴⁰ Jill Hussey and Roger Hussey, *Business Research: A Practical Guide for Undergraduate and Postgraduate Students*, London: MacMillan Press, Ltd, 1997, pg.1

⁴¹ Kenneth D. Bailey, *Methods of Social Research*, Free Press: London, 1987, pg.4

⁴² Ibid

gejala sosial, penelitian administrasi publik mempelajari gejala administrasi publik, begitu pula terhadap penelitian hubungan internasional yang mempelajari gejala hubungan internasional.⁴³

Dalam penelitian ini guna menjawab pertanyaan penelitian yang ingin diteliti, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian sosial yang menggunakan pendekatan kualitatif merupakan penelitian yang menggunakan latar alamiah, menggunakan metode pengumpulan data dari pengamatan, wawancara, studi dokumen, dan audiovisual, menganalisa data secara deskriptif yang lebih mementingkan proses daripada hasil, dan membatasi masalah penelitian berdasarkan fokus.⁴⁴ Penelitian kualitatif pada umumnya dapat digunakan dalam penelitian yang membahas mengenai aktifitas atau tingkah laku sosial, fungsionalis organisasi dan sebagainya. Melalui metode penelitian kualitatif ini, penulis mencoba meneliti kebijakan Jepang terkait isu polusi udara Tiongkok yang telah menyebar dan mengganggu bagi Jepang.

1.8.1 Batasan Penelitian

Batasan penelitian digunakan sebagai suatu ruang lingkup dari sebuah penelitian. Tujuan dari adanya batasan penelitian ini ialah agar penelitian yang diteliti tidak menjadi terlalu luas atau terlalu sempit. Dalam penelitian ini, batasan penelitiannya ialah mengetahui kebijakan luar negeri Jepang terhadap permasalahan polusi udara dari Tiongkok yang memberikan dampak buruk bagi Jepang semenjak tahun 2013-2016. Alasan mengapa penelitian ini mengambil periode penelitian semenjak tahun 2013-2016 ialah karena pada tahun 2013

⁴³ Ulber Silalahi, Metode Penelitian Sosial, PT. Refika Aditama, Bandung: 2009, hal.4

⁴⁴ Yanuar Ikbar, Metode Penelitian Sosial Kualitatif, PT Refika Aditama, Bandung: 2012, hlm.146

terjadi peningkatan polusi udara Tiongkok yang turut menyebar hingga ke Jepang akibat dari peningkatan kegiatan pembakaran batu bara Tiongkok.

1.8.2 Unit dan Tingkat Analisis

Dalam penelitian ini, unit analisis atau variabel dependen ialah Kebijakan Luar Negeri Jepang. Sedangkan unit eksplanasi atau variabel independen dalam penelitian ini ialah polusi udara Tiongkok dengan tingkat analisis yakni Negara. Unit analisis atau variabel dependen merupakan suatu objek kajian yang perilakunya akan dijelaskan, dideskripsikan, dan diramalkan sebagai akibat dari variabel lainnya.⁴⁵ Sementara itu, variabel yang dapat mempengaruhi perilaku variabel dependen ialah variabel independen atau yang disebut juga sebagai unit eksplanasi.⁴⁶ Selanjutnya tingkat analisa merupakan unit yang menjadi landasan keberlakuan sebuah pengetahuan.

1.8.3 Teknik Pengumpulan Data

Neuman mengklasifikasikan penelitian berdasarkan teknik pengumpulan data yakni kuantitatif dan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian dengan pengumpulan data dalam bentuk kata-kata dan gambar.⁴⁷ Teknik pengumpulan data kualitatif merupakan penelitian non-survei yang menggunakan data dari studi dokumen, literatur, sejarah, dan teks.⁴⁸

⁴⁵ Mohtar Mas'ood, *Ilmu Hubungan Internasional, Disiplin dan Metodologi*, Pusat Antar Universitas – Studi Sosial Universitas Gadjah Mada, LP3ES, pg. 110

⁴⁶ Ibid

⁴⁷ W. Lawrence Neuman, *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approach*, 4th ed., Boston: Allyn and Bacon, 2000, pg. 33

⁴⁸ Kenneth D. Bailey, *Methods of Social Research*, Free Press: London, 1987, pg. 39

Penelitian ini membahas mengenai kebijakan luar negeri Jepang terhadap Tiongkok terkait isu polusi udara. Menurut Haryono dan Saptopo, sumber data dari penelitian yang meneliti sebuah kebijakan dapat berupa :

- pemberitaan berbagai media massa tentang kebijakan yang dimaksud, tulisan-tulisan dari para praktisi, dan akademisi. Sumber acuan resmi dari suatu kebijakan dapat diperoleh dari undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan presiden, dan naskah-naskah, dan dokumen tertulis yang membuat kebijakan tersebut.
- Sumber data berikutnya adalah pengumuman atau pernyataan resmi dari pembuat kebijakan, penjelasan, dan jawaban-jawaban terhadap pertanyaan dan kritik yang muncul.⁴⁹

Dalam penelitian ini penulis menggunakan data sekunder yaitu melalui penelitian yang terlebih dahulu sudah dilakukan oleh peneliti lainnya. Data sekunder penulis dapatkan melalui studi literatur yang bersumber dari buku, jurnal ilmiah, makalah, artikel, website, dan dokumen yang terkait dengan isu penelitian ini.

1.8.4 Teknik Pengolahan Data

Dalam mengolah data, penulis akan memilah informasi yang didapatkan secara relevan dan dapat digunakan sesuai dengan isu yang diteliti. Selanjutnya, setelah penulis mendapatkan data-data yang relevan tersebut, penulis akan menyusun data-data tersebut menjadi pengetahuan yang terstruktur sehingga

⁴⁹ Ibid

memudahkan penulis dalam menganalisis dan menjawab pertanyaan penelitian dalam penelitian ini.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori kebijakan luar negeri agar dapat membantu dalam menjawab pertanyaan penelitian dari penelitian ini. Berdasarkan penjelasan teori kebijakan luar negeri yang telah dijelaskan pada bagian kerangka konseptual, penulis ingin meneliti bagaimana kebijakan luar negeri yang diambil Jepang dalam menghadapi permasalahan polusi udara Tiongkok ini. Penulis menggunakan model *rational choice* yang terdapat di dalam proses pembuatan kebijakan luar negeri.

Menurut Kegley dan Wittkopf dalam pembuatan kebijakan luar negeri yang menggunakan model *rational choice* terdapat 4 langkah yang harus diikuti oleh pembuat kebijakan yaitu; langkah pertama ialah *problem recognition and definition*, pada langkah ini para pembuat kebijakan telah mengetahui permasalahan eksternal apa yang sedang dialami oleh Jepang dimana pada penelitian ini permasalahan eksternal yang dimaksud ialah penyebaran polusi udara Tiongkok hingga ke Jepang. Langkah kedua ialah *goal selection*, pada langkah ini pembuat kebijakan harus mengetahui apa yang ingin diselesaikan dimana pada penelitian ini hal yang ingin diselesaikan ialah penyebaran polusi udara Tiongkok ke Jepang yang telah memberikan dampak buruk bagi Jepang. Langkah ketiga ialah *identification alternatives*, pada langkah ini dibutuhkan penyusunan data-data dari penyebaran polusi udara Tiongkok hingga ke Jepang beserta dampak buruk yang dialami oleh Jepang. Sehingga dengan penyusunan data-data tersebut akan dapat memunculkan opsi-opsi atau alternatif yang akan digunakan kedalam pembuatan kebijakan. Langkah keempat ialah *choice*, pada

langkah ini rasionalitas dibutuhkan dalam menentukan pengambilan opsi-opsi yang terbaik dalam pembuatan kebijakan sehingga tujuan atau kepentingan negara akan dapat tercapai.

1.9 Sistematika Penulisan

BAB I : Pendahuluan

Bab ini merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari beberapa sub bab yaitu; latar belakang masalah, rumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, studi pustaka, kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : Proses Pembuatan Kebijakan Luar Negeri Jepang

Bab ini berisi penjelasan mengenai bagaimana proses pembuatan kebijakan Luar Negeri Jepang.

BAB III : Penyebaran dan Dampak Buruk Polusi Udara Tiongkok ke Jepang

Bab ini berisi penjelasan konkrit terhadap penyebaran polusi udara Tiongkok hingga ke Jepang serta dampak buruk dari polusi udara tersebut bagi Jepang.

BAB IV : Kebijakan Luar Negeri Jepang terhadap Isu Polusi Udara Tiongkok

Bab ini menjelaskan tindakan yang diambil Jepang dalam menghadapi ataupun menyikapi permasalahan polusi udara Tiongkok. Sikap yang diambil Jepang terkait isu ini akan dapat dilihat dari kebijakan luar negeri Jepang terhadap Tiongkok.

BAB V : Kesimpulan dan Saran

Bab ini merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran dalam penelitian ini.

